

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019**



**DINAS PERHUBUNGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar. Salah satu diantaranya adalah Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan, kinerja aparatur pemerintahan daerah, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan dalam Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, pasal 11, yaitu :

1. Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

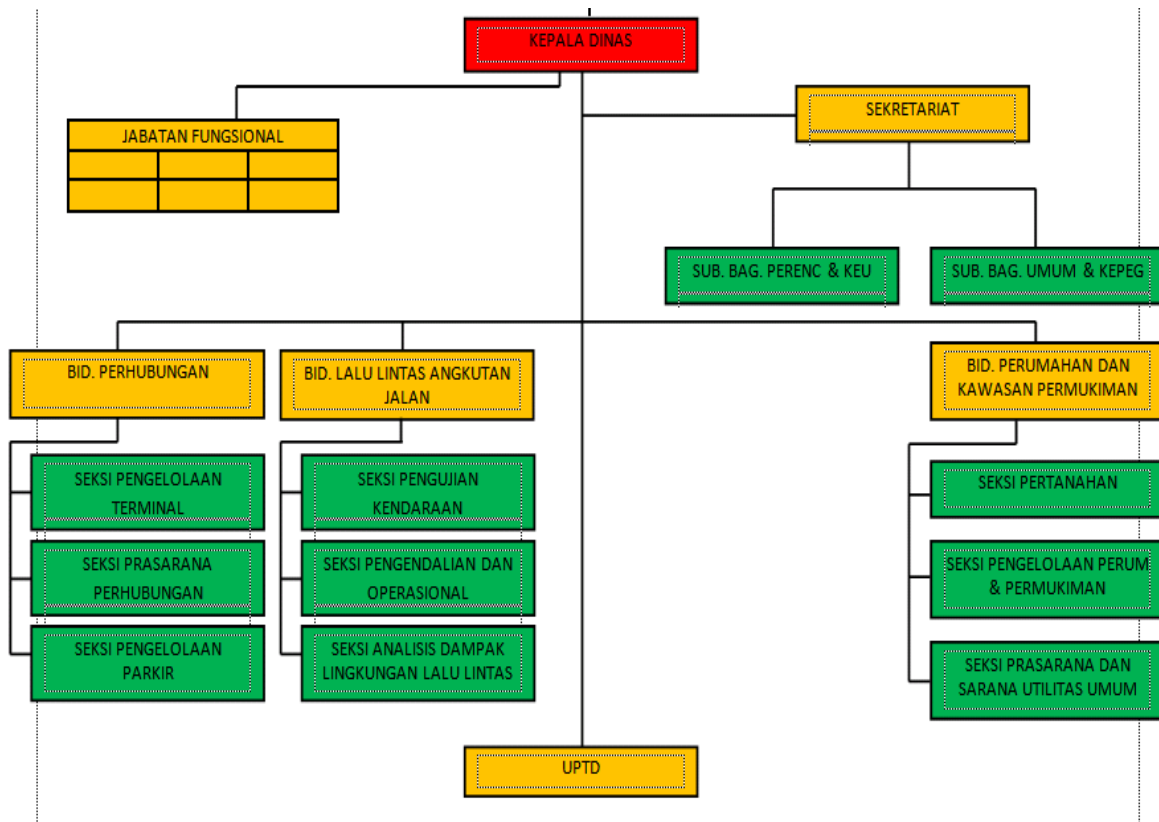
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Perhubungan, Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kesekretariatan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelaksanaan Pelayanan Umum di bidang Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Perhubungan, Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kesekretariatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Perhubungan, Pengendalian Operasional Keselamatan Jalan, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kesekretariatan;

4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demi tercapainya Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar :



## 1.2 Fungsi Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dimaksud, maka Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah di bidang Perhubungan, bidang Pengendalian dan Operasional keselamatan Jalan dan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Secara singkat Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sistem jaringan angkutan orang dan barang, merumuskan bahan rekomendasi perizinan di bidang angkutan umum, perizinan agen bus umum dan fasilitas terminal.
2. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal angkutan orang dan barang.
3. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pemilik kendaraan wajib uji tentang persyaratan kelaikan teknis kendaraan bermotor.

4. Merumuskan bahan kebijakan dan berbagai ketentuan di bidang lalulintas untuk mewujudkan kondisi lalulintas yang aman, lancar, tertib dan teratur.
5. Merumuskan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pengaturan dan keselamatan lalulintas serta sarana kelengkapan jalan lainnya.
6. Merumuskan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Analisa Dampak lalulintas dari pihak ketiga dalam setiap pembangunan fasilitas umum.
7. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta memberikan bimbingan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

### **1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut :

#### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

##### **1. Permasalahan Sekretariat**

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
3. Belum optimalnya kualitas dokumen perancahan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

##### **2. Permasalahan Bidang Perhubungan**

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit);
- b. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan parkir;
- d. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono;

##### **3. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usia peralatan pengujian;
- b. Kurangnya kesadaran wajib uji kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan;

- c. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas;
- d. Kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi pada saat libur panjang;
- e. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, tahun 2019 rambu-rambu lalulintas yang rusak/ tidak berfungsi sebanyak 52 unit, sedangkan kebutuhan sebanyak 229 unit;
- f. Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum (tahun 2019 angka pelanggaran/kecelakaan lalulintas sebesar 1.181 kasus;
- g. Banyaknya perlintasan rel kereta api yang tidak berpaling pintu, sebanyak 24 lokasi.

#### **4. Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a. Penanganan kawasan kumuh belum optimal, diketahui luasan kawasan kumuh pada tahun 2017 masih sebesar 59,7 Ha;
- b. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH), tahun 2017 masih 13.891 unit;
- c. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni;
- d. Mahalnya harga lahan, sehingga berpengaruh terhadap harga perumahan dan kemampuan masyarakat;
- e. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan/ permukiman;
- f. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan/ permukiman sehingga berpotensi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru di perkotaan;
- g. Belum optimalnya penanganan rehabilitasi bagi rumah korban bencana;
- h. Belum optimalnya penyediaan pengelolaan RTH di lingkungan perumahan/ permukiman;
- i. Belum semua bidang tanah Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersertifikat (capaian tanah yang belum bersertifikat tahun 2017 sebesar 49,19% atau sebesar 706 bidang).

**Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dan SDM secara kualitas dan kuantitas, khususnya SDM perhubungan dan teknis perumahan	Kapasitas SDM perhubungan dan teknis perumahan yang masih kurang serta gedung kantor yang tidak sesuai standart
		Turunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyediaan transportasi massa yang murah, nyaman dan terkoneksi;</li> <li>• Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang kurang optimal;</li> </ul>
		Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalulintas;</li> <li>• Kurangnya penyediaan fasilitas perlengkapan perhubungan (sarana dan prasarana perhubungan)</li> </ul>
		Masih terdapat kawasan kumuh di Kabupaten Karanganyar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kawasan kumuh belum optimal;</li> <li>• Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum (PSU) di perumahan dan lingkungan permukiman</li> </ul>
		Masih terdapat RTLH di Kabupaten Karanganyar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penanganan RTLH;</li> <li>• Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni</li> </ul>
		Masih rendahnya PSU perumahan yang belum bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan hukum atas pelanggaran perda PSU perumahan belum optimal;</li> <li>• Kesadaran pengembang perumahan dalam mengurus sertifikat PSU rendah;</li> <li>• Kurangnya koordinasi pemerintah dengan stakeholder terkait penyediaan perumahan (pengembang)</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2019

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

---

### 2.1 Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2018 – 2023.

#### 2.1.1 Visi

Rumusan visi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar ditetapkan setelah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, dan memperhatikan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023. Visi SKPD juga hendaknya mencerminkan dan merujuk pada Visi Pemerintah Daerah yang menaungi. Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 adalah "*Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar*". Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut, maka Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar menentukan Visi tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

*" Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar"*

Visi ini akan menjadi arah dan panduan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya.



### 2.1.2 Misi

Misi merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok, fungsi dari suatu organisasi. Adapun misi yang dicanangkan untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

“Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh”

### 2.1.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya infrastruktur menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

### 2.1.4 Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
2. Meningkatnya lingkungan permukiman dan fasilitas publik yang manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan hidup sehat

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Bupati tahun 2019, Secara lengkap tercantum pada table dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan</li></ul>	72 %
2	Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rasio rumah layak huni (%)</li></ul>	0.25%
3	Menurunnya luasan kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)</li></ul>	1.2 %
4	Meningkatnya PSU perumahan yang bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat (%)</li></ul>	5 %

## 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2018. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Tahun 2018 dituangkan ke dalam 13 (tiga belas) program, yaitu : Program pelayanan administrasi perkantoran <sup>1</sup>, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <sup>2</sup>, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <sup>3</sup>, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <sup>4</sup>, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan<sup>5</sup>, Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah<sup>6</sup>, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ <sup>7</sup>, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas<sup>8</sup>, Program pengelolaan areal pemakaman <sup>9</sup>, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor <sup>10</sup>, Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas <sup>11</sup>, Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) <sup>12</sup>, Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman <sup>13</sup>; kemudian dijabarkan ke dalam 46 (empat puluh enam) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 17.554.092.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh empat juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 10.316.323.000,00 dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 7.237.000.000,00. Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Bupati Karanganyar Tahun 2018 secara lengkap tercantum sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNDORO, SH, M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Jabatan : BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, 2019

**Pihak Kedua,**

**BUPATI KARANGANYAR**

**Pihak Pertama,**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN  
KARANGANYAR**

**Drs. H. JULIYATMONO, M.M.**

**SUNDORO, SH, M.Si.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

**DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan</li> </ul>	72 %
2	Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rasio rumah layak huni (%)</li> </ul>	0.25%
3	Menurunnya luasan kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)</li> </ul>	1.2 %
4	Meningkatnya PSU perumahan yang bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat (%)</li> </ul>	5 %

Program		Anggaran	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program pelayanan administrasi perkantoran</li> </ul>	Rp.	429.690.000
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> </ul>	Rp.	306.310.500
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</li> <li>▪ Program pembangunan prasarana dan fasilitas</li> </ul>	Rp.	152.049.500
4	perhubungan	Rp.	674.244.000
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program pengembangan perumahan</li> </ul>	Rp.	464.875.000
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</li> </ul>	Rp.	112.000.000

7	▪ Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rp.	386.525.000
8	▪ Program peningkatan pelayanan angkutan	Rp.	702.975.000
9	▪ Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp.	468.116.000
10	▪ Program pengelolaan areal pemakaman	Rp.	89.725.000
11	▪ Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp.	928.500.000
12	▪ Program peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas	Rp.	453.000.000
13	▪ Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp.	1.436.050.000
14	▪ Program pemeliharaan prasarana dan sarana penerangan jalan, taman, dan lingkungan pemukiman	Rp.	2.659.000.000
15	▪ Program penataan peraturan perundang-undangan	Rp.	50.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.313.060.000</b>

Karanganyar, 2019

**BUPATI KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Drs. H. JULIYATMONO, M.M.**

**SUNDORO, SH, M.Si.**

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>			
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	95.310.500	DAU
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	132.000.000	DAU
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25.400.000	DAU
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000	DAU
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	DAU
6	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	DAU
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.400.000	DAU
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	DAU
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.340.000	DAU
10	Penyediaan makanan dan minuman	36.000.000	DAU
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.050.000	DAU
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	156.000.000	DAU
13	Penyusunan Renstra OPD]	60.000.000	DAU
14	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	55.000.000	DAU
15	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	92.049.500	DAU
16	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	DAU

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>			
1	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	674.244.000	DAU
2	Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah	32.000.000	DAU
3	Pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan perparkiran	77.025.000	DAU
4	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	252.143.000	DAU
5	Pelayanan angkutan mudik lebaran	450.832.000	DAU
6	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	99.045.000	DAU
7	Pengadaan dan pemasangan Fasiitas Penunjang Keselamatan Jalan	194.071.000	DAU
8	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar	359.000.000	DAU
9	Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU dan Hight Mast	2.000.000.000	DAU
10	Pengadaa dan pengecetan zona selamat sekolah (zoss)	75.000.000	DAU
11	Pengadaan traffic barrier	100.000.000	DAU

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>BIDANG LLAJ</b>			
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	158.500.000	DAU
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	134.000.000	DAU
3	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	658.000.000	DAU
4	Peningkatan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	182.500.000	DAU
5	Pengadaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor	88.000.000	DAU
6	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	127.000.000	DAU



7	Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	30.500.000	DAU
8	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	50.000.000	DAU
9	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	152.000.000	DAU
10	Penyelenggaran forum LLAJ	30.500.000	DAU
11	Pemantauan dan pengawasan Analisi Dampak Lalu Lintas	43.000.000	DAU
12	Penyelenggaraan WTN	20.000.000	DAU

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>BIDANG PERUMAHAN</b>			
1	Penyusunan Prolegda Perumahan	50.000.000	DAU
2	Identifikasi kawasan kumuh	16.000.000	DAU
3	Fasilitasi pengurusan penyerahan prasarana lingkungan utilitas umum dan social perumahan dari pengembang ke pemda	80.000.000	DAU
4	Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman	89.725.000	DAU
5	Pemeliharaan Taman dan Monumen	1.236.050.000	DAU
6	Pengadaan pohon turus jalan kota	100.000.000	DAU
7	Pemutakhiran Data RTLH	65.575.000	DAU
8	Perencanaan Teknis Perumahan	91.000.000	DAU
9	Pemeliharaan PSU Perumahan	56.050.000	DAU
10	Fasilitas Program Bantuan Perumahan Swadaya	131.250.000	DAK
11	Fasilitas pelaksanaa RTLH	50.000.000	DAU
12	Pengadaan aplikasi SIM PSU Perumahan	25.000.000	DAU
13	Fasilitasi koordinator kotaku	30.000.000	DAU
14	Pengadaan sarana dan prasarana untuk perawatan taman	50.000.000	DAU
15	Penyusun DED taman adipura kabupaten karanganyar	50.000.000	DAU
16	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU)	200.000.000	DAU
17	Pengadaan dan pemasangan lampu hias	100.000.000	DAU

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2019, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran n dimaksud, maka

Dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

Sasaran 1. Terwujudnya Sarana Prasarana Penunjang Lalu Lintas Untuk Mendukung Kelancaran Lalu Lintas

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2019			Target akhir Renstra Th 2019	% CapaianThd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% capaian		
1	Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan pada Lalu Lintas	%	9%	9.98	9.49	9	9
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					9.49%		

Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2019 diatas sebesar 9.49 %. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Formula Penghitungan prosentase berdasarkan penurunan angka kecelakaan pada lalu lintas Jumlah Selisih Kejadian Kecelakaan yang terjadi 2019 sebanyak 94 dibagi Jumlah Kejadian Kecelakaan yang terjadi 2018 sebanyak 941 Kabupaten Karanganyar di kali 100% hasil 9.49 %.

Program pendukung sasaran 1 antara lain :

1. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
2. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3. Program peningkatan pelayanan angkutan
4. Program penungkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
5. Program peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas

Tabel 3.3

## Sasaran 2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2019			Target akhir Renstra Th 2019	% CapaianThd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% capaian		
1	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	100%	57,25%	78.62	100%	100%
2	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	15%	10.6 %	70.6	15%	15%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					74.61 %		

Capaian kinerja sasaran 2 untuk tahun 2019 diatas sebesar 74.61% atau kategori Baik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada formula perhitungan prosentase rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah RTLH yang diperbaiki oleh 458 dibagi 800 unit dikali 100% mendapatkan hasil 57.25 %. Pada formula perhitungan prosentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) terbangun dikawasan perkotaan Kabupaten Karanganyar 8,27 ha dibagi luas wilayah karanganyar 77.3 ha dikali 100% mendapatkan hasil 10.6 %.

Program untuk mendukung sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yaitu Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, indikator yang melebihi target tidak ada sedangkan indikator tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2019.

### 3.2 Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala dalam pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 yaitu :

- 1) SDM sebagai sumber daya organisasi belum optimal baik dari sisi integritas maupun kompetensi. Integritas yang kurang optimal ditandai dengan rendahnya disiplin, sementara masalah kompetensi ditandai dengan minimnya SDM yang mempunyai kompetensi di bidang Ahli Transportasi, kurang responnya terhadap permasalahan, kurangnya inovasi dan monoton terhadap persoalan-persoalan

substansi tugas pokok dan fungsi. Masalah leadership juga cukup menonjol terutama di dalam aspek manajemen yang bersifat teknis.

- 2) Alat Uji Kendaraan Bermotor rata-rata sudah berumur tua sehingga penggunaannya tidak optimal, Sarana Prasarana Keselamatan Jalan sering mengalami kerusakan karena faktor cuaca dan kondisi dan kurangnya kendaraan operasional lapangan yang digunakan untuk kegiatan rutin.
- 3) Pada kegiatan-kegiatan tertentu, pelaksanaannya bersifat monoton tidak ada inovasi maupun survey terhadap dampak kegiatan sehingga keberhasilan kinerja output tidak bisa mewakili gambaran outcome.
- 4) Belum tumbuhnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam membudayakan tertib berlalu lintas dan tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan atau jaringan jalan.
- 5) Terbatasnya anggaran APBD yang dikelola sehingga pencapaian sasaran melalui beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara bertahap baik itu dibidang Perhubungan , LLAJ, maupun Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
- 6) Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas.
- 7) Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas ruang terbuka hijau akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.

### **3.3 REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2019, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 10.316.323.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai         | Rp. 7.237.767.000,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.207.780.000.- |
| 3. Belanja Modal sebesar   | Rp. 5.108.543.000,- |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

## Realisasi Pelaksanaan Program Kerja

No.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>461.000.000</b>	<b>424.580.977</b>	<b>92,10%</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000	4.246.500	94,37%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.000.000	103.784.047	79,83%
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.000.000	31.802.450	90,86%
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.500.000	5.500.000	100,00%
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	25.000.000	100,00%
6.	Penyediaan alat tulis kantor	28.000.000	27.350.000	97,68%
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	14.458.800	72,29%
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.996.500	99,94%
9.	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.000.000	2.000.000	100,00%
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	4.770.700	95,41%
11.	Penyediaan makanan dan minuman	80.000.000	79.975.000	99,97%
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000	119.696.980	99,75%
<b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>217.000.000</b>	<b>211.033.200</b>	<b>97,25%</b>
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000	73.900.000	98,53%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	95.133.200	95,13%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000	15.000.000	100,00%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	27.000.000	27.000.000	100,00%
<b>C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>15.000.000</b>	<b>14.999.200</b>	<b>99,99%</b>
1.	Peningkatan SDM	15.000.000	14.999.200	99,99%
<b>D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>270.000.000</b>	<b>256.006.900</b>	<b>94,82%</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	9.961.900	99,62%
2.	Penyusunan SOP dan IKM	50.000.000	49.500.000	99,00%

3.	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	210.000.000	196.545.000	40,66%
<b>E. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		<b>424.540.000</b>	<b>416.610.000</b>	<b>98,13%</b>
1.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	424.540.000	416.610.000	98,13%
<b>F. Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>65.000.000</b>	<b>58.621.000</b>	<b>90,19%</b>
1.	Biaya Operasional Bantuan Perumahan	20.000.000	20.000.000	100,00%
2.	Fasilitasi Koordinator Kotaku	30.000.000	28.518.000	95,06%
3.	Identifikasi Kawasan Kumuh	15.000.000	10.103.000	67,35%
<b>G. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>		<b>82.000.000</b>	<b>34.277.500</b>	<b>74,61%</b>
1.	Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah	32.000.000	31.700.000	99,06%
2.	Fasilitasi Pengurusan Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Sosial Perumahan dari Pengembang ke Pemda	50.000.000	29.479.900	58,96%
<b>H. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>		<b>328.000.000</b>	<b>324.801.450</b>	<b>99,02%</b>
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	155.000.000	152.429.450	98,34%
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	100.000.000	99.700.000	99,70%
3.	Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran	73.000.000	72.672.000	99,55%
<b>I. Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>		<b>478.000.000</b>	<b>473.117.000</b>	<b>98,98%</b>
1.	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	216.000.000	214.547.000	99,33%
2.	Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	192.000.000	189.494.000	98,69%
3.	Operasional dan Persiapan Mudik Lebaran	40.000.000	39.576.000	98,94%
4.	Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran Tk. Provinsi	30.000.000	29.500.000	98,33%
<b>J. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>		<b>170.000.000</b>	<b>168.997.000</b>	<b>99,41%</b>
1.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	150.000.000	149.097.000	99,40%
2.	Pengadaan Rambu Lalu Lintas Kawasan Terminal Wisata	20.000.000	19.900.000	99,50%
<b>K. Program pengelolaan areal pemakaman</b>		<b>60.000.000</b>	<b>59.881.000</b>	<b>99,80%</b>
1.	Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman	60.000.000	59.881.000	99,80%
<b>L. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>		<b>1.240.000.000</b>	<b>1.224.370.000</b>	<b>98,74%</b>

1.	Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	518.000.000	513.370.000	99,11%
2.	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	165.000.000	164.000.000	99,39%
3.	Peningkatan Catudaya PLN	82.000.000	81.000.000	98,78%
4.	Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	475.000.000	195.000.000	98,11%
<b>M. Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas</b>		<b>545.000.000</b>	<b>507.867.000</b>	<b>93,19%</b>
1.	Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	60.000.000	60.000.000	100,00%
2.	Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	25.000.000	24.930.000	99,72%
3.	Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	75.000.000	74.910.000	99,88%
4.	Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas	15.000.000	14.750.000	98,33%
5.	Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	190.000.000	184.839.000	97,28%
6.	Penyelenggaraan Forum LLAJ	25.000.000	22.750.000	91,00%
7.	Pemantauan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas	40.000.000	28.899.000	72,25%
8.	Penyelenggaraan WTN	40.000.000	21.959.500	54,90%
9.	Penyelenggaraan Karnaval Mobil Hias	75.000.000	74.829.000	99,77%
<b>N. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>		<b>1.105.000.000</b>	<b>1.095.651.900</b>	<b>99,15%</b>
1.	Pemeliharaan Taman dan Monumen	925.000.000	918.652.900	99,31%
2.	Pengadaan Pohon Turus Jalan Kota	100.000.000	98.670.000	98,67%
3.	Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten Karanganyar	30.000.000	29.029.000	96,76%
4.	Pemeliharaan Taman Air Mancur	50.000.000	49.300.000	98,60%
<b>O. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman</b>		<b>4.705.783.000</b>	<b>4.296.373.450</b>	<b>91,30%</b>
1.	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar	300.000.000	297.302.250	99,10%
2.	Pengadaan dan Pemasangan High Mast	200.000.000	192.275.000	96,14%
3.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJU)	3.945.783.000	3.549.858.200	89,97%
4.	Pemeliharaan Lampu Hias Pohon	20.000.000	198.680.000	98,40%
5.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Taman Air Mancur	200.000.000	197.850.000	98,93%
6.	Perbaikan Truck Crane (Mobil Tangga Listrik)	15.000.000	14.800.000	98,67%
7.	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kerja	25.000.000	24.608.000	98,43%



<b>P. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>150.000.000</b>	<b>113.742.050</b>	<b>75,83%</b>
1.	Penyusunan Perda Rumah Susun	60.000.000	45.319.750	75,53%
2.	Penyusunan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	60.000.000	44.412.750	74,02%
3.	Penyusunan Perda Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000	24.009.550	80,03%
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>10.316.323.000</b>	<b>9.707.832.027</b>	<b>94,10%</b>

### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah OPD mempunyai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab Karanganyar, khususnya pasal 11, yaitu :

- 1) Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan pemaparan dan pengukuran serta analisis terhadap rencana kegiatan, rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencapaian indikator output dan pencermatan terhadap outcome yang telah berhasil dicapai, diperoleh gambaran mengenai kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar tahun 2018.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam 62 kegiatan yang meliputi 32 kegiatan rutin dan 27 kegiatan pengadaan. Secara khusus sasaran strategis terlihat dari indikator-indikator kegiatan non rutin yang masuk dalam 14 program dibawah ini :

- 1) Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
- 2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- 4) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Permukiman.
- 5) Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 8) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- 9) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan..

- 10) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- 11) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- 12) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
- 13) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- 14) Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas.

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar 2014-2018, pelaksanaan program kegiatan di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar tahun 2018 dapat berjalan efektif dan efisien. Tugas-tugas yang diberikan telah dilaksanakan secara benar, terorganisir dan berjalan sesuai jadwal. Dalam hal kinerja keuangan, serapan anggaran terlaksana secara maksimal, terlihat dari anggaran sebesar Rp. 19.599.492.000,- realisasi sebesar Rp. 14.601.162.434,- atau 74,50% dari total anggaran. Semua keberhasilan pencapaian kinerja tidak semata-mata dinilai dari terserapnya anggaran dan terwujudnya output kegiatan, namun secara keseluruhan upaya mewujudkan kinerja yang optimal adalah hasil dari dijalankannya fungsi manajemen. Konsekuensi menjalankan fungsi manajemen dengan mengoptimalkan alat-alat sarana (tools) manajemen berimbang pada tercapainya 2 (dua) sasaran strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar, yaitu :

- 1) Terwujudnya sarana prasarana penunjang lalu lintas untuk mendukung kelancaran lalu lintas;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;

Namun disadari bahwa keberhasilan pencapaian kinerja tidak luput dari permasalahan, dan kendala yang ada. Oleh karena itu keberhasilan ini selalu masih menyisakan kekurangan-kekurangan yang harus diselesaikan dan dituntaskan dengan mengedepankan solusi.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Adapun strategi pembangunan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat diformulasikan pada analisa matrik SWOT sebagai berikut :

		KEKUATAN	KELEMAHAN
Faktor Internal		Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar	SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas
Faktor Eksternal		Tersedianya fasilitas pengendali traffic light secara terpadu dengan menggunakan ATCS	Peralatan yang dimiliki sekarang ini sangat terbatas jumlahnya dan belum maksimal
		Tersedianya fasilitas monitoring lalu lintas yang terpusat dengan menggunakan CCTV	Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki
		Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor	Gedung pengujian yang digunakan saat ini sudah tua dan memerlukan perawatan yang memakan biaya cukup tinggi
		Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	Peralatan pengujian yang digunakan saat ini sudah cukup umur sehingga memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi
PELUANG	Letak geografis Kabupaten Karanganyar yang berada di kaki gunung Lawu sehingga banyak menjadi tujuan wisata saat ini	Mampu meningkatkan kualitas serta profesionalisme Aparatur Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan	Pelayanan kepada masyarakat harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat meminimalisir kekecewaan masyarakat akibat pelayanan yang tidak cepat, tepat dan lengkap
	Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten Karanganyar baik di desa maupun perkotaan		

TANTANGAN	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal yang diindikasikan dengan sudah mulaiberumurnya peralatan-peralatan yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor serta belum tercukupinya tenaga teknis pengujian ;	Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan hrambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, penataan injon trayek dan kerjasama antar lembaga pemerintah.	Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduan dengan sistem pasaran lainnya
	Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi pada saat libur an ataupun long weekend sehingga menambah kemacetan dan diberbagai ruas jalan ;		
	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan ;		

Pada tahun 2019, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :

- 1) Terwujudnya sarana prasarana penunjang lalu lintas untuk mendukung kelancaran lalu lintas;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.  
Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KARANGANYAR

**SUNDORO, SH, M. Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610512 198812 1 001